



Keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif dan kaitannya dengan ketahanan politik :: Studi kasus di DPRD Propinsi DIY periode 1999-2004
HARTATI, Sri, Prof.Drs. Kasto, MA

The Representativeness of Woman in Legislative Institution and Its Relation with the Political Resilience

Case Study in DPRD of Province of DIY Period 1999 – 2004

Sri Hartati

NIM: 18356/IV-8/243/02

Abstract

This research analyzing to what extent the role and representativeness woman member of DPRD province of DIY in process of bylaw and know factors any kind of becoming constraint and impeller for woman in executing the function as member of DPRD province of DIY. Method used is case method with qualitative descriptive approach, while technique for data collecting: documentation and interview. This research is conducted in DPRD province of DIY with responder five woman member and five chief of faction (PDI P, PKB, Golkar, PAN, and Persatuan) period 1999 - 2004.

Research result indicate that the quality of woman in institute of legislative not significant. This due to only a few number (just 9.09%), decreasing from period before all (from 6 people to 5 people), domination mechanism of party, position in commission which disagree with education background and profession before all. Role and effectiveness woman as a member of DPRD province of DIY not yet maximal, this matter seen from product in the form of bylaw which if traced more circumstantial are to revise of existing by laws and there is no by law product presenting characteristic of feminism. In addition, not yet seen clearly role run by all legislative members of woman in course of bylaw formulation. So that can be told that representativeness of woman in legislative institution of province of DIY period 1999 - 2004 did not influence yet function, role, and authority of DPRD. Minimal ability about technical of legal drafting of women in legislative institution, inexistence method about technical input from society and inexistence intensive relation with society, hence can be concluded that the representativeness of woman in legislative institution not yet give maximal contribution for regional politics resilience of DIY.

However, by various reason, 90% of responder agree that woman remain to be expected in legislative institute even if enabling more amount, of course through memberships in party and have the quality in political area.

Key Words: Woman, Representativeness, Political Resilience.



Keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif dan kaitannya dengan ketahanan politik :: Studi kasus di DPRD Propinsi DIY periode 1999-2004
HARTATI, Sri, Prof.Drs. Kasto, MA

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF
DAN KAITANNYA DENGAN KETAHANAN POLITIK:
STUDI KASUS DI DPRD PROPINSI DIY PERIODE 1999 – 2004**

Sri Hartati
NIM : 18356/IV-8/243/02

Intisari

Penelitian ini menganalisis sejauhmana peran dan efektivitas anggota perempuan lembaga legislatif di Propinsi DIY dalam proses pembuatan peraturan daerah dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan kendala bagi perempuan dalam melaksanakan fungsinya sebagai anggota lembaga legislatif Propinsi DIY. Metode yang digunakan adalah metode kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data meliputi interview dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Legislatif Propinsi DIY dengan responden lima orang anggota perempuan dan lima orang ketua fraksi (PDI P, PKB, Golkar, PAN, dan Persatuan) periode 1999 - 2004.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas anggota perempuan lembaga legislatif dinilai masih kurang, Hal ini disebabkan oleh jumlah yang sedikit (9,09% saja), berkurang dari periode sebelumnya (dari enam ke lima orang), mekanisme partai yang dominan, penempatan di komisi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan profesi sebelumnya. Peran dan efektivitas anggota perempuan lembaga legislatif di Propinsi DIY belum maksimal, hal ini terlihat dari produk berupa peraturan daerah yang jika ditelusuri lebih mendalam lebih banyak merupakan revisi dari peraturan daerah yang pernah ada dan tidak ada produk peraturan daerah yang menampilkan ciri-ciri dari feminisme. Disamping itu belum terlihat secara jelas peran yang dijalankan oleh para anggota perempuan lembaga legislatif dalam proses perumusan peraturan daerah. Sehingga dapat dikatakan keterwakilan perempuan lembaga legislatif di Propinsi DIY periode 1999 - 2004 belum mempengaruhi peran, fungsi, dan wewenang DPRD. Sedikitnya anggota perempuan lembaga legislatif yang memiliki kemampuan tentang teknik pembuatan peraturan (*legal drafting*), tidak adanya metode atau cara menjangkau masukan dari masyarakat dan tidak adanya hubungan yang intensif dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa anggota perempuan lembaga legislatif di Propinsi DIY belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap ketahanan politik wilayah DIY.

Meskipun demikian, dengan berbagai alasan, 90 persen responden setuju bahwa perempuan tetap diharapkan ada di lembaga legislatif bahkan kalau memungkinkan jumlahnya lebih banyak, tentu saja melalui keanggotaan di partai dan memiliki kualitas di bidang politik.

Kata Kunci : Perempuan, Keterwakilan, Ketahanan Politik.